

**THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND  
RESPONSIVITY ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS IN  
TULUNGAGUNG DISTRICT, TULUNGAGUNG DISTRICT**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN RESPONSIVITAS  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN  
TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Violinda Dhina Widaningrum<sup>1</sup>, Firda Zulfa Fahriani<sup>2</sup>**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung<sup>1,2</sup>

[viodhina@gmail.com](mailto:viodhina@gmail.com)<sup>1</sup> , [firdazulfa@uinsatu.ac.id](mailto:firdazulfa@uinsatu.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of accountability, transparency and responsiveness on the quality of financial reports in Tulungagung. In this study, primary data collected by using Google form and quantitative methods. The population in this study were village administrative officer throughout the Tulungagung. By calculating the Slovin formula, it generates 69 samples of individual respondent. With a significance of 0.684 and tcount of 0.409, the findings show that partially the accountability variable has no effect and is not significant on the quality of financial statements. Partially, transparency affects the quality of financial reports and significantly influences it with a significance of 0.000 and tcount of 5.589. With a significance of 0.003 and tcount 3.071 the responsiveness variable partially affects the quality of financial reports. Accountability, transparency and responsiveness all affect the quality of financial statements simultaneously and have a significant influence on it with a significance of 0.000 and Fcount of 45.995. In conclusion, the quality of financial reports in Tulungagung District, Tulungagung Regency is influenced by the transparency and responsiveness variables, while the accountability variable has no effect. Simultaneously accountability, transparency, and responsiveness affect the quality of financial reports in Tulungagung.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Responsiveness, Financial Report Quality*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan responsivitas terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Pada penelitian ini, data primer diambil dengan menggunakan *google form* dan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di seluruh Kecamatan Tulungagung. Hasil penelitian ini diperoleh dengan penghitungan rumus Slovin, menghasilkan sampel sebanyak 69 individu yang akan menjadi responden. Dengan signifikansi 0,684 dan  $t_{hitung}$  0,409, temuan menunjukkan bahwasanya secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial transparansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan secara signifikan mempengaruhinya dengan signifikansi 0,000 dan  $t_{hitung}$  5,589. Dengan signifikansi 0,003 dan  $t_{hitung}$  3,071 variabel responsivitas secara parsial mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Akuntabilitas, transparansi dan responsivitas semuanya mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara bersamaan dan memiliki pengaruh signifikan pada hal itu dengan signifikansi 0,000 dan  $F_{hitung}$  45,995. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu kualitas

laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh variabel transparansi dan responsivitas, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh. Secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas berpengaruh atas kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas, Kualitas Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN

Pemerintah berupaya menerapkan *good governance* tidak hanya dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi tetapi juga dalam rangka keterkaitan antara kewajiban negara dengan rakyatnya. Karena akuntabilitas dalam konteks tata pemerintahan yang baik tidak hanya menekankan penggunaan sumber daya secara efektif tetapi juga bagaimana sumber daya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, warga negara memiliki hak untuk menilai setiap tindakan yang diambil oleh pemerintahnya (dapat dipertanggungjawabkan). Transparansi merupakan prasyarat untuk melaksanakan akuntabilitas, sehingga akuntabilitas dan transparansi merupakan konsep yang berkaitan erat. Akuntabilitas diperlukan untuk pengembangan administrasi yang efektif, demokratis, dan dapat diandalkan (Rusdiana, 2018).

Pemerintahan yang baik harus bersifat terbuka dalam pengelolaan keuangannya kepada publik. Oleh sebab itu, akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan Negara. Permasalahan terkait dengan akuntabilitas masih menjadi persoalan yang masih dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah hingga saat ini. Menurut (Raba, 2006) Akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan dan melaporkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak yang memberi amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruhnya.

Penyajian dan pelaporan informasi dari Pemerintah Publik bersifat terbuka, sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Hal itu tidak lepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Partisipasi dari masyarakat juga diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang efektif (Damayanti, 2018). Pemerintah akan terbantu dalam menilai keberhasilan dengan daya tanggap masyarakat. Laporan keuangan yang berkaitan dengan rencana keuangan yang akan diungkapkan kepada masyarakat, merupakan salah satu informasi keuangan pemerintah. Dalam pembuatan laporan keuangan, harus memahami isi laporan keuangan dan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) untuk menyusun laporan keuangan. Bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik, akan sangat membantu jika menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena ini membantu memenuhi kebutuhan umum akan informasi keuangan yang lebih berkualitas. SAP berbasis kas diterapkan hingga tahun 2003, namun mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, SAP menggunakan basis kas menuju akrual. Tetapi, mulai tahun 2015 SAP berbasis akrual. Diharapkan

bahwa prosedur akuntansi yang baik digunakan oleh instansi dan pengawasan yang optimal terhadap pelaporan keuangan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dan pengelolaan urusan pemerintahan yang lebih baik. Korupsi dapat diantisipasi dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga pemerintah Indonesia dapat mewujudkan *good governance* baik di pusat maupun di daerah. (Handoko, 2021)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nina Rosalin Siahaan, 2018) bertujuan untuk menentukan bagaimana akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menarik kesimpulan bahwa akuntabilitas mempengaruhi kualitas laporan tersebut sampai batas tertentu dan bahwa faktor transparansi memiliki dampak yang sama. Faktor akuntabilitas dan keterbukaan secara bersama-sama berdampak pada kualitas laporan keuangan dalam hal stimulasi. Penelitian lain dilakukan oleh (Lailatul Hikmah, 2020) yang bertujuan untuk mengetahui dampak transparansi, akuntabilitas, dan responsif terhadap pengelolaan keuangan masyarakat pada masyarakat Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel responsif dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan variabel transparansi berpengaruh kecil namun signifikan. Sedangkan secara simultan yang berpengaruh besar terhadap pengelolaan keuangan desa adalah faktor transparansi, akuntabilitas, dan responsif. Penelitian lain dilakukan oleh (Tika Septiningtyas, 2017) yang bertujuan untuk mengidentifikasi

dampak pencatatan keuangan pemerintah daerah berdasarkan akuntabilitas, keterbukaan, dan pengetahuan tentang standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian *intern*. Menurut hasil penelitian ini, pemahaman sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sistem pengendalian *intern* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi juga tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat perbedaan pada variabel yang akan diteliti. Penulis meneliti secara bersamaan tiga variabel bebas yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Responsivitas dengan variabel terkait yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan penelitian terdahulu belum ada yang meneliti ketiga variabel tersebut secara bersamaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, dimana belum pernah dilakukan penelitian di Kecamatan Tulungagung terkait dengan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan responsivitas terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

### **Kajian Teori Akuntabilitas**

Menurut (Mardiasmo, 2002), akuntabilitas merupakan gambaran dari pemegang amanah yang berutang kepada pemberi amanah yang berhak dan berwenang meminta

pertanggungjawaban untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas adalah kapasitas untuk bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok terhadap komunitas organisasi yang lebih besar. Menurut (Mursyidi, 2009), akuntabilitas adalah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya entitas pelapor dan melaksanakan kebijakan yang ditugaskan padanya untuk mencapai tujuan berulang atau secara periodik.

Catatan keuangan yang berkualitas akan dihasilkan dari akuntabilitas yang kuat. Akibatnya, akuntabilitas dipandang sebagai syarat untuk mencapai tata kelola yang baik, atau yang secara umum dikenal dengan *good governance*. Akuntabilitas adalah jenis pertanggungjawaban yang digunakan oleh pemerintah, di mana para pekerja bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan di bawah wewenangnya. Akuntabilitas diambil untuk mencapai tujuan kebijakan dan program yang ditetapkan. Hal ini akan dapat meningkatkan kepercayaan publik dengan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat (Septiningtyas, 2017).

Akuntabilitas keuangan kepada masyarakat penting dilakukan untuk memberikan informasi atas capaian-capaian dari pemerintah desa. Dana desa yang berasal dari masyarakat, menjadikan pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada masyarakat. Menurut (Mahmudi, 2015) Akuntabilitas ada 2 yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal membuat komitmen pada otoritas yang lebih tinggi; dalam hal ini pemerintah desa

membuat komitmen kepada pemerintah kabupaten. Akuntabilitas kepada masyarakat umum atau organisasi yang tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain dikenal sebagai akuntabilitas horizontal. Hal ini dilakukan karena merupakan hak publik untuk mengakses data uang yang telah digunakan untuk keperluan yang telah ditetapkan. Indikator Akuntabilitas menurut Raba (2006) yang dikutip David Halmer dan Mark Turner meliputi : 1) Keterbukaan, 2) Pemanfaatan sumber daya yang optimal, 3) Upaya peningkatan efisiensi, 4) Upaya peningkatan efektivitas.

### **Transparansi**

Menurut (Krina, 2003), Transparansi diartikan sebagai asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan dalam proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penerimaan Negara dan Pendapatan Asli Daerah yang Berasal dari Industri Ekstraktif, menjelaskan bahwa prinsip transparansi meliputi: keterlibatan pemangku kepentingan, keterbukaan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. (RI, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 26 Tahun 2010, 2010)

Dalam kaitannya dengan manajemen, transparansi berarti adanya partisipasi dalam pengelolaan suatu tugas, diimbangi dengan pentingnya pengungkapan, yang mencakup pedoman yang tegas dari pejabat mengenai jenis informasi yang mereka berikan dan penerima informasi tersebut. Memberikan pemangku kepentingan informasi yang tepat waktu, tepat, dan relevan adalah definisi transparansi. Gagasan

transparansi menumbuhkan kepercayaan warga negara dan pemerintah serta menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan relevan. Menurut (Kristianten, 2006) ada beberapa indikator dalam transparansi, yakni sebagai berikut : 1) Penyediaan akses informasi yang jelas, 2) Musyawarah yang melibatkan masyarakat, 3) Keterbukaan proses pengelolaan, 4) Keterbukaan informasi tentang dana desa.

### **Responsivitas**

Menurut (Siagian, 2019), responsivitas merupakan kemampuan aparatur untuk menghadapi dan mengantisipasi tujuan baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. (Tangkilisan, 2005) mendefinisikan responsivitas sebagai kapasitas birokrasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, membuat agenda dan prioritas pelayanan, serta membuat program pelayanan yang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas merupakan bentuk respon atau tanggapan oleh pihak penyedia layanan dalam membantu dan menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk pelayanan. Responsivitas sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik karena untuk mengenali kebutuhan masyarakat (Riadi, 2022). Responsivitas menjadi salah satu indikator pelayanan yang berkaitan dengan daya tanggap aparatur terhadap kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik (RI, Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009, 2009). Responsivitas memiliki beberapa indikator menurut (Hardiansyah, 2011) yakni : 1) Merespon pihak yang membutuhkan layanan, 2) Melakukan pelayanan dengan cepat, 3) Melakukan pelayanan

dengan tepat, 4) Melakukan pelayanan dengan cermat.

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan aspek yang penting dalam penyedia layanan publik. Dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas, akan dapat memberikan informasi mengenai kondisi penyedia layanan publik dalam suatu periode yang nantinya laporan keuangan tersebut digunakan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Kualitas keuangan yang rendah dapat mendorong ketidakpercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan ((IAI, 2009) SAK (Standar Akuntansi Keuangan) nomor 1 Tahun 2009, situasi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas disajikan dalam laporan keuangan secara terstruktur. Menurut Ratih (2010) yang termuat dalam (Fajri, 2013) laporan keuangan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan. Dapat dipercaya serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam pencatatan laporan keuangan, yakni pencatatan basis kas dan basis akrual.

Basis kas tetap digunakan dalam Laporan Keuangan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk melakukan pembukuan dan menyajikan laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pendanaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Penyediaan data realisasi anggaran dan keadaan keuangan pemerintah desa yang membantu pembaca laporan dalam menilai dan merumuskan

kebijakan ke depan merupakan salah satu tujuan laporan keuangan desa. Selain itu, laporan keuangan pemerintah desa merupakan salah satu cara bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelolanya dan yang telah diberikan. Sedangkan pada pencatatan basis akrual, pencatatan dilakukan langsung pada saat transaksi terjadi. Hal ini sangat berbeda dengan pembuatan laporan keuangan Desa yang menggunakan pencatatan basis kas. (Mardiasmo, 2002)

Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa saat ini sedang dilakukan penyusunan standarisasi oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Oleh karena itu, tidak ada salahnya Pemerintah Desa mempelajari ide penerbitan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa terlebih dahulu agar lebih memahaminya sebelum diterapkan secara nasional nantinya. Tentu saja, pemerintah desa kini menggunakan neraca saat menyusun basis akrual untuk laporan keuangan desa. Neraca Desa merinci Aset (kekayaan) dan Kewajiban organisasi pemerintah Desa per tanggal, serta setiap pergeseran kekayaan selama satu periode berjalan. Karakteristik kualitas laporan keuangan seperti yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

**Hipotesis Penelitian**

Hipotesis secara parsial yaitu sebagai berikut :

H0 : Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

H0 : Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

H2 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

H0 : Responsivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

H3 : Responsivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Hipotesis secara simultan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H0 : Akuntabilitas, transparansi dan responsivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

H4 : Akuntabilitas, transparansi dan responsivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

**Kerangka Konseptual**



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Sumber : Gambar diolah peneliti, 2023

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, karena untuk mengetahui adanya pengaruh dari beberapa variabel yang selanjutnya akan diuji hipotesisnya. Dimana dalam penelitian kuantitatif, analisisnya lebih fokus pada data numerikal (angka) yang diolah menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 26. Peneliti mengumpulkan data-data dan fakta yang terjadi dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode angket, dengan menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi dan dijawab oleh responden.

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah perangkat desa beserta staff pada 14 kelurahan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Total populasi yang digunakan untuk penelitian ini berjumlah 224 orang. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dimana sampel diambil secara acak berdasarkan jumlah perangkat desa yang berhubungan langsung dalam penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Dimana sampel diperoleh menggunakan rumus Slovin, dengan penghitungannya sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{224}{1 + 224(0,1)^2}$$

$$n = 69,13$$

Dibulatkan menjadi 69 perangkat desa.

Diketahui :

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (10%)

### Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini ada tiga variabel, yaitu :

- Akuntabilitas (X1)  
Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur desa kepada masyarakat.
- Transparansi (X2)  
Transparansi merupakan keterbukaan mengenai seluruh kebijakan pemerintah daerah.
- Responsivitas (X3)  
Responsivitas merupakan kemampuan aparatur dalam menampung dan menyikapi aspirasi masyarakat

### Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y). Laporan keuangan yang berkualitas bersifat relevan, andal, mudah dipahami dan mudah diandalkan.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuisisioner atau angket dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden, yaitu perangkat desa yang ada di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Kuisisioner disebarkan secara online melalui *google form* sehingga tidak perlu menggunakan kertas (*paperless*).

### Teknik Skala Penelitian

Skala penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 5 point skala Likert untuk menungkapkan jawaban responden dengan memilih lima alternatif jawaban yaitu sangat

setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 26. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji T, Uji F dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Dalam uji validitas, instrumen yang digunakan di Kecamatan Tulungagung, yaitu menggunakan program SPSS versi 26. Maka didapatkan hasil seperti pada tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	R hitung	Keterangan
Akuntabilitas	0,611	0,375 s.d. 0,663	Reliabel/Valid
Transparansi	0,677	0,377 s.d. 0,663	Reliabel/Valid
Responsivitas	0,668	0,397 s.d. 0,662	Reliabel/Valid
Kualitas Laporan Keuangan	0,703	0,473 s.d. 0,689	Reliabel/Valid

Sumber : Data Primer diolah

Dari tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai validitas dari tabel untuk seluruh indikator variabel bebas dan

**Uji Hipotesis**

**1. Uji Parsial (Uji T)**

Hasil uji hipotesis uji T ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji T**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1.701	3.124		.545	.588
Akuntabilitas (X1)	.047	.115	.044	.409	.684
Transparansi (X2)	.590	.106	.589	5.589	.000
Responsivitas (X3)	.317	.103	.284	3.071	.003

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : hasil olahan dari SPSS 26

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa pada variabel akuntabilitas (X1) nilai signifikansi 0,684 dan nilai  $t_{hitung}$  0,409 <  $t_{tabel}$  1,995,

sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh secara parsial dan negatif antara variabel X1 terhadap variabel Y. Sedangkan untuk variabel transparansi (X2) nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  5,589 >  $t_{tabel}$  1,995, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yang berarti terdapat pengaruh secara parsial dan positif antara variabel X2 terhadap variabel Y. dan untuk variabel responsivitas (X3) nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  3,071 >  $t_{tabel}$  1,995, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima yang berarti terdapat pengaruh secara parsial dan positif antara variabel X3 terhadap variabel Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel transparansi dan responsivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung.

**2. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara bersama terhadap variabel terikat. Uji dilakukan dengan membandingkan nilai dari F hitung dengan menggunakan SPSS versi 26.

**Tabel 3. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	293.488	3	97.829	45.995	.000 <sup>b</sup>
	Residual	138.251	65	2.127		
	Total	431.739	68			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Responsivitas (X3), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

Sumber: hasil olahan dari SPSS 26

Berdasarkan Tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 45,995. Sedangkan nilai  $F_{tabel}$  adalah sebesar 2,74. Selain itu, signifikannya adalah sebesar 0,000. Dikarenakan nilai  $F_{hitung}$  45,995 >  $F_{tabel}$  2,74 dan nilai signifikansi lebih kecil daripada taraf signifikansi, sig f  $0,000 < 0,05$ . Maka hipotesis keempat diterima, berarti terdapat pengaruh simultan dari variabel akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan Tulungagung.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi atau akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan responsivitas (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y). nilai  $R^2$  dapat dilihat pada hasil pengolahan data bagian *model summary* pada program SPSS versi 26.

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.824 <sup>a</sup>	.680	.665	1.45840

a. Predictors: (Constant), Responsivitas (X3), Transparansi (X2), Akuntabilitas (X1)

Sumber: hasil olahan dari SPSS 26

Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui nilai *R square* sebesar 0.680. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan variabel independent yaitu akuntabilitas, transparansi, responsivitas terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan yaitu sebesar 68% atau variasi variabel independent akuntabilitas, transparansi dan responsivitas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 68% variabel dependen kualitas laporan keuangan, sementara itu, 32% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### Pembahasan

#### Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian secara parsial, akuntabilitas tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, diperoleh dari hasil hipotesis pertama dengan menggunakan program SPSS versi 26 dapat diketahui persamaan regresi linear berganda yaitu  $Y = 1,701 + 0,047 (X1)$ . Dengan signifikansi sebesar 0,684 yaitu lebih besar dari nilai alfa 0,05 dan nilai

$t_{hitung}$  0,409 dengan nilai  $t_{tabel}$  1,995 yang artinya nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil daripada  $t_{tabel}$ . Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan dan  $H_1$  ditolak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiningtyas, 2017), bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

#### Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut pengujian secara parsial, transparansi memiliki pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hasil yang diperoleh dalam uji hipotesis menggunakan SPSS versi 26, persamaan untuk regresi linear berganda yaitu  $Y = 1,701 + 0,590 (X2)$ . Dengan signifikansi  $0,000 <$  nilai alfa 0,05 dan  $t_{hitung}$  5,589 dengan nilai  $t_{tabel}$  adalah 1,995. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  yakni transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosalin, 2018) bahwa variabel transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### Pengaruh Responsivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut pengujian secara parsial, responsivitas memiliki pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hasil yang diperoleh dalam uji hipotesis menggunakan SPSS versi 26, persamaan untuk regresi linear berganda yaitu  $Y = 1,701 + 0,317 (X3)$ . Dengan signifikansi  $0,003 <$  nilai alfa 0,05 dan  $t_{hitung}$  3,071 dengan nilai  $t_{tabel}$  adalah 1,995. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  yakni responsivitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini serupa dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Hikmah, 2020), yang menemukan bahwasanya responsif berpengaruh secara parsial.

### **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Responsivitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Menurut uji simultan yang menunjukkan bahwasanya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi dan responsivitas secara signifikan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 26. Diketahui persamaan regresi linear berganda yaitu  $Y = 1,701 + 0,047x_1 + 0,590x_2 + 0,317x_3$  dengan signifikansi  $0,000 < \text{nilai alfa } 0,05$  dan  $F_{\text{hitung}} 45,995$  lebih besar daripada nilai  $F_{\text{tabel}} 2,74$ . Hal ini dikuatkan oleh koefisien determinasi (R Square)  $0,680$  yang menunjukkan bahwasanya perubahan Y (kualitas laporan keuangan) dapat dijelaskan oleh variabel X akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas hingga 68%. Variasi atau faktor tambahan yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian menyumbang 32% sisanya dari penjelasan. Sehingga dapat disimpulkan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan  $H_4$  diterima.

### **PENUTUP kesimpulan**

Kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung secara simultan dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Secara parsial kualitas laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas. Namun, transparansi dan responsivitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- (IAI), I. A. (2009, Desember 15). *Standar Akuntansi Keuangan*. Retrieved from PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan: <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-7-psak-1-penyajian-laporan-keuangan>
- Damayanti, E. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2.
- Fajri, S. N. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Universitas Negeri Padang*, 4.
- Handoko, B. L. (2021, November 19). *Binus University School of Accounting*. Retrieved from Mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan: <https://accounting.binus.ac.id/2021/11/19/mengenal-standar-akuntansi-pemerintahan/>
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hikmah, L. (2020). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit

- Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- RI, B. P. (2009, Juli 18). *Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009*. Retrieved from Pelayanan Publik: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>
- RI, B. P. (2010, April 23). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 26 Tahun 2010*. Retrieved from Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41045/perpres-no-26-tahun-2010#:~:text=PERPRES%20No.%2026%20Tahun%202010,Industri%20Ekstraktif%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
- Riadi, M. (2022, Juni 29). *Responsivitas (Pengertian, Indikator, Prinsip dan Strategi)*. Retrieved from Kajian Pustaka: <https://www.kajianpustaka.com/2022/06/responsivitas.html>
- Rosalin, N. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Universitas HKBD NOMMENSEN.
- Rusdiana, N. (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Septiningtyas, T. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 3-4.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.